

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menjadi pemenang perang serta memiliki kekuatan yang besar sampai hari ini merupakan salah satu dari landasan mengapa Amerika Serikat merasa pantas untuk tetap menduduki kursi tunggalnya sebagai negara adidaya dunia. Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, Amerika Serikat secara berkelanjutan terus berupaya memperlihatkan kekuasaannya dalam segala aspek. Terlebih setelah Uni Soviet mengalami kemunduran pesat, sehingga Amerika Serikat menjadi pihak pendominasi yang terus menerus berkembang dan melebarkan pengaruhnya disetiap belahan dunia. Mulai dari aspek terpenting seperti; ekonomi, industri, teknologi, politik, militer, dan sebagainya, telah dikuasi Amerika Serikat secara penuh.

Dalam aspek politik, Amerika Serikat dikenal dengan pengaruh persebaran hegemoni<sup>1</sup> yang kuat. Demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) menjadi dua isu yang selalu dibawa Amerika Serikat dalam misi menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga memenuhi dominasinya dalam aspek militer dan keamanan. Pengadaan senjata yang berinovasi dan alat-alat militer terbaru menjadikan pasukan Amerika Serikat sebagai salah satu pasukan elit yang disegani dunia. Alat-alat ini digunakan sebagai penunjang kekuatan militer Amerika Serikat mengingat pasukan militer milik negara

---

<sup>1</sup> Suatu dominasi atas norma, maupun tingkah laku suatu kelompok sehingga pihak yang didominasi akan secara sadar akan mengikuti dan mendukung pemikiran dari pihak yang mendominasi (Gramsci, 1971)

paman Sam ini tidak hanya beroperasi dikawasannya saja, melainkan juga dalam menjalankan misi perdamaian atau sebagai utusan kepada negara sekutunya. Hal ini juga berhubungan dengan dominasi Amerika Serikat dalam aspek keamanan.

Menjadi negara dengan kekuatan yang besar dan jaringan militer yang kuat serta mampu mempertahankan stabilitas kawasannya pasca perang, menjadikan Amerika Serikat mendominasi aspek keamanan secara global dan mendeklarasikan dirinya sebagai 'polisi dunia'. Sebagai bentuk dari peran tersebut, kemudian Amerika Serikat akan melibatkan diri dalam isu konflik yang terjadi sebagai pihak penengah dan menawarkan penyelesaian konflik disana. Meski dalam sebagian keterlibatan tersebut Amerika Serikat justru terlibat dalam kontak senjata, namun bentuk penyelesaian konflik semacam ini ataupun negosiasi damai yang pernah tercapai dilain isunya telah membuktikan eksistensi Amerika Serikat sebagai negara dengan pengaruh penuh dan 'polisi dunia' yang baik.

Ada banyak isu dimana Amerika Serikat kemudian sempat melibatkan diri sebagai pihak penengah yang berupaya menyelesaikan konflik, diantaranya; perang Irak-Iran yang berlangsung sejak 1980-1988 ini berakhir dengan gencatan senjata serta pengembalian perbatasan selayaknya saat perang belum terjadi, keterlibatan lainnya adalah perang Israel-Palestina yang masih terus berlangsung sampai hari ini, dikarenakan Amerika Serikat yang memiliki hubungan dekat dengan Israel sebagai sekutunya.

Selain itu, Amerika Serikat juga melibatkan diri dalam Revolusi Libya dimana masyarakat setempat melakukan penggulingan rezim Muammar Gaddafi, perang antara Korea Utara-Korea Selatan yang kemudian memisahkan dua wilayah ini menjadi dua negara independen masing-masing dengan ideology yang bertolak belakang, serta keterlibatan yang juga masih menjadi

upaya Amerika Serikat dalam proses penyelesaiannya ialah sengketa Laut China Selatan.

Negara adidaya yang kala itu sudah berada dalam era kepemimpinan Barack Obama ini mulai menata jalan kebijakan dengan mengutamakan perundingan dalam setiap tindakannya. Ini jelas berbeda dengan identitas Amerika Serikat saat berada dalam masa kekuasaan mantan persiden Gorge W. Bus. Amerika Serikat mulai meletakkan posisinya sebagai pihak yang menempatkan perdamaian sebagai isu penting yang patut dicapai. Olehnya kemudian atas dasar kekhawatiran akan munculnya perdebatan besar dan menurunnya tingkat keamanan disekitar kawasan konflik Laut China Selatan, Amerika Serikat mengajukan usulan agar masalah ini diselesaikan dengan jalur diplomasi dan sebisanya untuk menghindari bentrok senjata antara pasukan militer negara-negara yang bersengketa.

Hal ini semakin didukung dengan adanya rancangan kebijakan Amerika Serikat oleh presiden Obama yang kala itu memutuskan untuk memfokuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada penguatan eksistensinya dikawasan Asia. Melalui kebijakan luar negeri –salah satunya– *Pivot to Asia*, Amerika Serikat berupaya mempererat kerjasama dengan negara-negara dikawasan tersebut lewat aspek-aspek seperti; politik, militer, dan ekonomi.

Sengketa Laut China Selatan sendiri merupakan konflik lama yang telah melibatkan negara-negara disekelilingnya. Didasari oleh berbagai alasan klaim beberapa negara berdatangan, mulai dari China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunie Darussalam terhadap perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi ini. Berada di perairan *semi-closed sea*<sup>2</sup> serta dikelilingi oleh dataran dan

---

<sup>2</sup> Suatu teluk, cekungan, atau laut yang dikelilingi dua atau lebih lautan dan terhubung dengan laut lain atau samudera melalui suatu celah, atau terdiri sepenuhnya atau sebagian besarnya dengan wila-

dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia, ditambah dengan kandungan SDA (Sumber Daya Alam) melimpah di dalamnya, menjadikan kawasan ini begitu diinginkan sebagai bagian dari wilayahnya.

Kepulauan Spartly dan kepulauan Paracel yang terletak di tengah kawasan Laut China Selatan adalah pusat dari sengketa yang terjadi. Dua pulau ini merupakan pulau dengan gugusan karang yang besar secara keseluruhan, lalu membentuk beberapa pulau yang tidak terlalu besar dan terpisah-pisah. Bagian dari kepulauan Spartly sendiri telah terbagi atas beberapa klaim kekuasaan dari Vietnam, Filipina, Taiwan, dan China. Kawasan yang terdiri dari gugusan karang ini memiliki potensi SDA yang besar.

Berdasarkan data oleh *U.S. Geological Survey* setidaknya terdapat 4.8 milyar *barrel* untuk kandungan minyak bumi dan 64 milyar kubik gas alam, potensi minyak ini telah menghadirkan keberadaan dari perusahaan eksplorasi, seperti; *Exxon Mobil Corp*, *Forum Energy Plc*, *Vietnam Oil and Gas Group* atau *Petro Vietnam*, serta *Talisman Energy Inc* (Hargreaves, 2012). Selain itu perairan ini juga menyumbang angka yang besar bagi perolehan hasil laut berupa ikan untuk konsumsi, ekologi karang, dan tembakau.

Letak geografis yang strategis dalam jalur pelayaran internasional juga menjadi pemicu keuntungan yang diinginkan setiap negara pengklaim. Laut China Selatan merupakan perairan dengan jalur pelayaran yang sibuk dan padat karena tidak hanya diisi oleh perjalanan kapal niaga namun juga oleh kapal supertanker. Permasalahannya kesibukan jalur pelayaran dikawasan ini dipadati oleh kapal niaga yang menjadikan jalur Laut China Se-

---

yah laut territorial negara lain dan zona ekonomi eksklusif dari dua negara lain atau lebih.

latan sebagai jalur penghubungnya menuju belahan dunia yang lain. Sehingga akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri ketika kawasan ini dapat dimiliki oleh suatu negara tertentu, seperti; pengadaan pelabuhan yang nantinya dapat dipastikan mampu menjadi lahan perolehan ekonomi baru jika kawasan ini dijadikan tidak sekedar jalur pelayaran semata namun juga akses pelabuhan dan aktifitas ekonomi lainnya.

Dari sederet faktor tersebutlah, setiap negara kemudian mengemukakan dasar pengklaiman terhadap kawasan sengketa dengan acuan yang berbeda-beda. Sebagian dari negara yang bersengketa menggunakan peta sejarah dinasti maupun peta peninggalan penjajah sebagai patokan klaim seperti yang dilakukan; China, Taiwan, dan Vietnam sebagai negara dengan acuan ini. Sedangkan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia diketahui menjatuhkan klaimnya berdasarkan pada aturan pasal 57 UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) sebagai acuan klaimnya, dimana pada pasal tersebut membuat ketentuan bagi wewenang negara untuk memperluas wilayah zona ekonominya tidak lebih dari 200 mil terhitung dari garis pantai (UNCLOS, 1982).

Adanya perbedaan dasar pengklaiman ini kemudian menyebabkan penolakan terhadap klaim dari negara lain oleh masing-masing negara yang bersengketa. Selain itu, hal tersebut juga memberikan dampak pada kemunculan insiden-insiden yang terjadi di wilayah sengketa.

Pada pertengahan November 2012 lalu China telah merilis gambar peta pada *passport* barunya dengan menyertakan daratan Taiwan serta kawasan sengketa di dalamnya. Peta versi terbaru ini secara otomatis mendapat penolakan keras dari negara-negara yang juga bersengketa di kawasan Laut China Selatan, yakni Filipina dan Vietnam. Keduanya merasa bahwa apa yang dilakukan China terhadap peta tersebut adalah salah satu dari bentuk 'pemaksaan' yang dilakukan agar mendapatkan pengakuan terhadap kepemilikan kawasan serta termasuk

dalam pelanggaran kedaulatan. Garis titik-titik dalam peta bahkan bisa memberikan efek yang besar pada kegiatan dikawasan, seperti jarak navigasi serta ilegalitas pelayaran dikawasan serta termasuk dalam pelanggaran kedaulatan. Situasi ini menyebabkan kondisi kawasan dilapangan sempit memanas.

Masalah serupa seperti ketegangan dikawasan sengketa seringkali terjadi karena disebabkan adanya pertentangan perihal pelanggaran lintas perbatasan yang illegal. Beberapa kapal patroli perbatasan menjadi pelaku utama dalam hal ini. Patroli yang pernah dilakukan oleh pasukan China pada 2015 lalu menjadi salah satu dari insiden yang berujung pada langkah diplomasi antara China dan Malaysia kala itu. Kapal patroli milik China yang memasuki wilayah teritori Malaysia dianggap telah menyalahi aturan karena telah menurunkan jangkar dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif<sup>3</sup> (ZEE) milik negeri Jiran sehingga Kuala Lumpur memberikan peringatannya pada Beijing.

Namun permasalahan kapal patroli tidak hanya terjadi diantara negara yang bersengketa saja, Amerika Serikat beberapakali mendapatkan kecaman dari China karena keberadaan kapal patrolinya disekitar perairan sengketa. China yang secara terang-terangan menentang keberadaan Amerika Serikat selalu memberikan tindakan agresif seperti; saling menghadang jalur, bahkan sampai kepada pidato China dalam sebuah forum pembahasan sengketa yang juga dihadiri Amerika serikat didalamnya. Selain kapal patroli, zona udara juga menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan. Dalam banyak insiden China harus berurusan dengan pesawat tempur milik negara sengketa lainnya karena melintas diatas langit kawasan

---

<sup>3</sup> Zona yang luasnya 200 ml laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam didalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang diatasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

yang menjadi klaimnya. Sama seperti halnya kapal patroli, China juga tidak segan memberi tindakan pada pesawat tempur milik Amerika Serikat yang mengitari wilayahnya, karena pada salah satu insiden pada 2015 lalu, China memberikan tindakan keras berupa pencegahan terhadap pesawat tempur Amerika Serikat yang sedang melakukan patroli udara dilangit kawasan.

Selain itu, munculnya kegiatan pembangunan disekitar kawasan sengketa yang dilakukan diantaranya oleh beberapa negara terlibat ikut mengundang perseteruan lain. China merupakan salah satu dari negara yang membangun pulau buatan dikawasan sengketa, tepatnya disekitar kepulauan Spartly. Dengan dalih pada tujuan pembangunan yang akan diperuntukkan bagi sipil dan penyediaan fasilitas terhadap kapal yang melintas, China menolak tuduhan atas tujuan pebangunan pulau buatan tersebut ialah diperuntukan bagi kegiatan militerisasi. Meski pada kenyataannya, China melayangkan protes keras terhadap tindakan pesawat tempur milik Amerika Serikat yang melintas diatas pulau buataannya dan menuding hal tersebut sebagai tindakan mata-mata.

Meski secara geografis tidak bersinggungan langsung dengan kawasan sengketa ini, namun Laut China Selatan merupakan kawasan yang menjadi perhatian Amerika Srikat sebagai salah satu pihak yang menengahi sengketa ini. Unstabilitas kawasan menjadi alasan utama bagi Amerika Serikat untuk berupaya membantu penyelesaian sengketa yang masih berlanjut karena dirasa akan menghambat kegiatan komersil serta pergerakan lalu lintas maritim lainnya.

Dari insiden-insiden yang terjadi di Laut China Selatan ini kemudian Amerika Serikat merasa bahwa penyelesaian secara damai terhadap konflik sengketa yang terjadi perlu dilakukan demi menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan. Terlebih atas tindakan China yang mencantumkan peta kawasan sengketa pada *passport* serta pembangunan pulau buatan dikawasan yang turut mem-

perlihatkan betapa negeri tirai bambu itu memiliki dominasi pun ambisi yang kuat dikawasan Laut China Selatan saat ini.

Kedepannya ini tentu akan memberikan dampak luas terhadap kawasan dan negara-negara sekelilingnya, termasuk pada Amerika Serikat yang secara tidak langsung juga memiliki kepentingan dikawasan sengketa. Penggunaan jalur navigasi dan lintas patroli laut adalah sebagian kecil dari permasalahan yang akan dihadapi Amerika Serikat apabila sengketa ini terus berlanjut atau setidaknya mengalami insiden-insiden lainnya. Selain itu keberadaan aliansinya dalam sengketa memperkuat kepentingan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik. Terhubung dengan aliansi bersama Filipina, Amerika Serikat jelas memiliki tujuan yang sama untuk hasil sengketa ini. Terlebih dengan dominasi China yang semakin naik kepermukaan kian mempengaruhi Amerika Serikat untuk menjadi pengimbang agar setidaknya meminimalisir dampak terburuk seperti kontak senjata.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa Laut China Selatan pada era kepemimpinan Obama?

## **C. Kerangka Berpikir**

Dalam kajiannya, politik luar negeri menurut Gibson merupakan komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Politik luar negeri ditujukan kepada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa (Roy, 1995, p. 31). Dasar dari rancangan politik luar negeri ini ialah kepentingan nasional yang menjadi kendaraannya. Sementara jalan menuju pencapaian tersebut akan dilakukan lewat sebuah diplomasi.



Dalam proses perwujudannya inilah kemudian politik luar negeri memiliki kaitan yang erat dengan diplomasi. Politik luar negeri merupakan induk dari konsep yang menghasilkan diplomasi sebagai operasional dari rancangannya. Dalam buku yang berjudul *Diplomasi* oleh S.L Roy memuat bahwa menurut J.R. Childs;

*“Politik luar negeri suatu negara adalah substansi hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi adalah proses dimana kebijakan itu dilaksanakan.”*

Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan antara politik luar negeri dan diplomasi dalam pendefinisian J.R. Childs ini layaknya substansi dan metode (Roy, 1995, p. 33). Selain itu, dari sumber yang sama Harlord Nicholson yang merupakan seorang penulis tentang diplomasi dalam penelitiannya juga menuliskan tentang keterkaitan dua hal ini. Menurut Nicholson;

*“Politik luar negeri didasarkan atas konsepsi umum kebutuhan nasional. Sebaliknya diplomasi merupakan sebuah alat atau metode. Diplomasi berusaha, dengan menggunakan akal, perdamaian dan pertukaran kepentingan, untuk mencegah konflik besar diantara negara-negara. Diplomasi merupakan lembaga, melalui politik luar negeri yang berusaha mencapai tujuannya lewat persetujuan, ketimbang perang.”* (Roy, 1995, p. 34).

Diplomasi sendiri memiliki definisi secara sederhana sebagai pengelolaan hubungan antara negara menurut *The Oxford English Dictionary* (The Oxford English Dictionary), adapun diplomasi juga merupakan suatu metode dimana negara, melalui agen yang berwenang (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah diplomat<sup>4</sup>), memeli-

---

<sup>4</sup> Diplomat adalah seseorang yang diutus sebagai representative suatu negara kepada negara lain yang menjalin kerjasama diplomatic dengan negara yang mengutusinya.

hara hubungan timbal balik, berkomunikasi satu sama lain, dan membawa transaksi politik dan ekonomi (Muldoon Jr., 1999, p. 1).

Sementara itu para ahli memiliki beberapa perbedaan dalam pemberian definisi terhadap diplomasi. Diantaranya adalah; KM Pnikkar yang mendefinisikan diplomasi dalam hubungannya dengan politik luar negeri, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan Ivo D. Duchacek berpendapat bahwa, diplomasi merupakan praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi. Dan Clausewitz, menghubungkan diplomasi dengan perang sehingga menurutnya perang merupakan lanjutan dari diplomasi dengan melalui saran lain diluar perdamaian (Roy, 1995, pp. 3-4).

Dari beberapa definisi diatas kemudian dapat dipahami bahwa diplomasi merupakan metode dari upaya mewujudkan politik luar negeri lewat usaha negosiasi yang dilakukan suatu negara kepada negara lain yang memiliki jalinan kerjasama dengan membawa kepentingan nasionalnya sebagai tujuan dari tindakan yang dilakukan. Diplomasi juga pada umumnya terjadi dalam situasi damai, namun pada beberapa kasus yang terjadi diplomasi bisa juga dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai dan meredakan konflik. Diplomasi juga dikategorikan dalam dua jenis, yakni; *soft diplomacy* dan *hard diplomacy*. *Soft diplomacy* mengacu pada proses penyelesaian masalah yang dilalui dengan cara perundingan damai. Sementara *hard diplomacy* mengarah pada kelanjutan diplomasi seperti yang dimaksudkan oleh Clausewitz, dimana penyelesaian konflik dicapai melalui kontak senjata. Ini tentu saja tidak terlepas dari keterkaitan isu dengan jenis dan ruang lingkup yang mempengaruhi bentuk tindakan diplomasi itu sendiri.

Ada beberapa bagian dari ruang lingkup yang menjadi pokok pembahasan diplomasi. Isu-isu diplomasi

yang terus berkembang memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi ruang lingkup diplomasi yang tidak lagi sekedar berkecimpung dalam ranah politik, ekonomi, dan militer saja. Namun terus merambat pada ruang lingkup yang lebih luas meliputi; HAM, kebudayaan, lingkungan, keamanan, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis memilih diplomasi politik dan diplomasi kemanan sebagai kerangka berpikir yang akan digunakan sebagai sudut pandang menganalisa isu kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa Laut China Selatan pada era kepemimpinan Obama yakni diplomasi politik dan diplomasi kemanan.

#### **a. Diplomasi Politik**

S.L. Roy dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy* menuliskan, diplomasi politik sendiri mengacu kepada tujuan mempererat hubungan antara negara sekutu, memelihara hubungan dengan negara-negara sehaluan dan menetralsir negara yang memusuhi, serta membina atau bahkan mengumpulkan persahabatan baru melalui negosiasi yang bermanfaat karena tujuan akan lebih mudah dicapai bersama pihak yang memiliki kesamaan kepentingan didalamnya (Roy, 1995, p. 6).

Diplomasi ini biasanya ditandai dengan adanya kerjasama bilateral antara kedua negara yang bersangkutan, ataupun kerjasama multilateral dengan penggabungan kemitraan dalam golongan atau organisasi tertentu. Hal ini kemudian sejalan dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam upaya keterlibatannya pada sengketa Laut China Selatan yakni, membangun aliansi dengan negara yang bersengketa. Dalam hal ini Amerika Serikat meningkatkan kerjasama kepada negara-negara dikawasan Asia Pasifik khususnya negara-negara yang berada dalam lingkup terdekat dengan kawasan sengketa. Amerika Serikat meningkatkan hubungan bilateralnya dengan beberapa negara, seperti; Vietnam dan Filipina yang terlibat dalam sengketa, ataupun Indonesia dan beberapa negara ASEAN (*Assosiation of South East Asia Nation*) lainnya yang

memiliki tujuan serupa, yakni penyelesaian konflik. Diluar kerjasama bilateral antar negara, Amerika Serikat juga memiliki hubungan kerjasama dengan organisasi regional terdekat, yaitu ASEAN. Ini juga didukung dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam beberapakali kehadirannya dalam forum ASEAN *Regional Forum* (ARF) dan pidato utusannya yang menyampaikan usulan perancangan penyelesaian sengketa.

## **b. Diplomasi Keamanan**

Adapun diplomasi keamanan mengacu pada upaya dalam membangun program kemitraan melalui penggunaan program terkait keamanan, dan tidak menggunakan ancaman kekuatan terhadap mitra kerjasama. Diplomasi keamanan juga merupakan mekanisme untuk mengumpulkan dan memantau negara-negara sekutu dalam sebuah pendekatan diplomatik<sup>5</sup>. Selain itu diplomasi ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan melindungi setiap bagian dari negaranya. Umumnya diplomasi keamanan akan berlangsung dalam berbagai bentuk kerjasama dibidang keamanan misalnya; revitalisasi kerjasama militer, keamanan territorial, isu keamanan maritime, serta beberapa kegiatan militer, seperti agenda latihan pasukan dan lain sebagainya.

Diplomasi keamanan ini kemudian berhubungan dengan tindakan Amerika Serikat dalam upayanya untuk mencapai penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Dimana Washington dan Manila menyepakati penyediaan pangkalan kapal milik Amerika Serikat dalam operasi patroli keamanannya yang berada dekat dengan kawasan sengketa sehingga Amerika Serikat mampu memantau kondisi kawasan dalam jarak yang cukup dekat. Selain itu kerjasama ini juga mencakup pengadaan persenjataan

---

<sup>5</sup> D. Kron, Nicholas. 2015. "Security Diplomacy: Beyond Defense". Tesis. John Hopkins University for the degree of Master of Arts in Global Security Studies, hal. 29.

dimana Manila akan mendapatkan suplai dari Washington, serta Filipina juga memilih pasukan Amerika Serikat sebagai *partner* latihan maupun operasi lapangan. Kerjasama lain Amerika Serikat adalah menyangkut kebebasan dan keamanan maritim juga merupakan bentuk kerjasama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Vietnam dalam upaya peningkatan dan penekanan dominasi pihak China.

#### **D. Hipotesa**

Dari penjabaran studi kasus dan kerangka berpikir yang digunakan, penulis akhirnya menarik hipotesa bahwa, kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa di Laut China Selatan pada era kepemimpinana Obama adalah;

1. Melakukan kebijakan diplomasi politik melalui ketergabungan Amerika Serikat dalam agenda forum internasional dan organisasi regional ASEAN.
2. Sedangkan dalam kebijakan diplomasi keamanan Amerika Serikat melakukan kerjasama dalam bentuk bantuan militer terhadap Filipina dan Vietnam terkait bantuan persenjataan maupun bantuan pasukan militer oleh Amerika Serikat.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari ditulisnya karya ilmiah ini oleh penulis, diantaranya;

1. Untuk memahami fenomena konflik yang terjadi dikawasan Laut China Selatan.
2. Untuk mengetahui bentuk kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap sengketa kawasan Laut China Selatan pada era kepemimpinan Obama.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian yang penulis targetkan dalam tulisan ini ialah pada upaya apa saja yang dilakukan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan, yang mana pada tulisan ini penulis juga membatasi analisisnya hanya dalam rentang waktu kepemimpinan presiden Amerika Serikat yang ke-44 saja, yaitu pada masa jabatan Barak Obama.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan jenis metode pengumpulan data yang mana menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data sekunder dimana data sekunder tersebut merupakan data yang penulis peroleh dalam bentuk tulisan yang memang sudah dipublikasikan sebelumnya, baik itu melalui situs, buku, jurnal, artikel, maupun media cetak yang dirasa relevan dengan topik pembahasan oleh penulis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan BAB I akan berisi perihal; latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada BAB II akan berisi tentang bagaimana konflik Laut China Selatan dimulai. Kemudian meliputi; sebab munculnya konflik, siapa saja yang terlibat, seperti apa perkembangan konflik, serta dampak dari konflik.

Pembahasan BAB III akan berisi kebijakan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan pada dua era kepemimpinan presiden sebelum Obama, yang pada penjabarannya akan memuat kebijakan presiden Bill Clinton dan George W. Bush sebagai pembanding nantinya dengan era kepemimpinan Obama.

BAB IV akan menunjukkan bagaimana bentuk kebijakan dari Amerika Serikat terhadap sengketa yang terjadi di Laut China Selatan pada era kepemimpinan Obama. Pada bab ini akan dijabarkan bentuk kerjasama apa saja yang menjadi kebijakan dari Obama.

Sementara itu sebagai penutup, BAB V nantinya akan berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi materi penulisan dalam karya ini dari keempat bab sebelumnya.

